

**STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN  
ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANI AMINAH YAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

**STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN  
ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**ANI AMINAH YAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Ani Aminah Yan**

Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering dijumpai dikota besar. Untuk menangani persoalan tersebut, pemerintah kota Bandar Lampung mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah beberapa kali melakukan penertiban anak jalanan. Namun setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dijalankan hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat strategi penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui strategi kebijakan penanggulangan anak jalanan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Waktu penelitian pada bulan oktober 2020 – desember 2020 dengan sampel anak jalanan yang ditemui di lampu merah sukrame (bypass) dan lampu merah way halim. Hasil dari penelitian ini adalah masih ditemukannya keterbatasan SDM, dana, sarana prasarana, serta kualitas pelayanan yang masih bervariasi. Sehingga Dinas Sosial belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Lalu faktor penghambat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pembinaan anak jalanan yaitu tidak adanya panti asuhan yang dimiliki pemerintah kota Bandar Lampung sehingga biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial cukup besar.

**Keyword: Anak Jalanan, Dinas sosial, dan Bandar Lampung.**

## **ABSTRACT**

### **THE STRATEGY OF CITY GOVERNMENT IN HANDLING STREET CHILDREN IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG**

**By**

**Ani Aminah Yan**

Street children are one of the social problems that are often found in big cities. To deal with this problem, the city government of Bandar Lampung issued policy in the form of Regional Regulation No. 03 on 2010 concerning fostering street children, homeless people and beggars. The Bandar Lampung City Government has several times carried out curbing street children. However, after evaluating the implementation of the policy, the result have not been as expected. The purpose of this study was to determine the factors that encourage and hinder the strategy of handling street children by the social service. The type of research used is descriptive research type with a qualitative approach. The time of the research was in October 2020 – December 2020 with samples of street children who were found at the Sukarame (bypass) red light traffic and the Wayhalim red light traffic. The result of this research is that there are still limitation of human resources, funds, infrastructure, and the quality of service that is still varied. So, the social service has not shown the results expected by the Bandar Lampung city Government. Then the inhibiting factor of Bandar Lampung city social service in fostering street children is the absence of an orphanage owned by the Bandar Lampung city government so that the costs incurred by the social service are quite large

**Keyword: Street children, Social Service, Bandar Lampung**

Judul Skripsi : **STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM  
PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA  
BNDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Ani Aminah Yan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1416021014**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



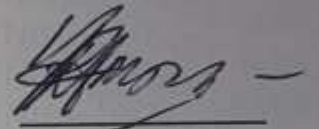
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

  
Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.  
NIP. 19611218 198902 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



**Penguji : Darmawan Purba, S.IP, M.IP**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP.19610807198703 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Juli 2021**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Juli 2021  
Yang Membuat Pernyataan



**Ani Aminah Yan**  
1416021014

## RIWAYATHIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Metro provinsi Lampung pada tanggal 6 Juli 1996 , sebagai anak pertama dari Bapak Lasmin Lubi dan Ibu Siti Aisah. Penulis memiliki seorang adik laki – laki bernama Riyan Adi Saputra.

Penulis menyelesaikan pendidikan pad ataman kanak – kanak (TK) di TK Gula Putih Mataram tahun. Pendidikan sekolah dasar di SDS Gula Putih Mataram dan lulus pada 2006. Pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Gula Putih Mataram dan lulus pada 2011. Pendidikan sekolah menengah atas di SMA Sugar Group dan lulus pada 2014

Pada tahun 2014 penulis teraftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti beberapa kegiatan, antara lain mengiuti Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, mengikuti Social Politic English Club (Spec) dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di desa Sinar Jaya, Kec Pubian. Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.



## **MOTTO**

“Ambil Kesempatan dan jangan pernah menyesal, karena pada satu titik semua yang anda lakukan adalah apa yang kamu inginkan”

**(Ani Aminah Yan)**

“Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia, apapun yang terjadi”

**(Audrey Hepburn)**

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillah rabbil'alami telah mengauridhoi Ya Allah langkah hamba-Mu,  
sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Teriring Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad

Shalallahu'alaihi wassalam serta keluarga dan para sahabatnya.

Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

“Ayahandaku Lasmin Lubi dan Ibundaku Siti Aisah” terima kasih doa dan kasih sayang yang tiada habisnya serta setiap perjuangan yang telah kalian curahkan untuk seluruh anak-anaknya. Semoga karya ini dapat membuat bangga dan memberikan kebahagiaan atas segala jerih dan payah yang telah dikerjakan.

“Teruntuk Adikku Riyan Adi Saputra” Terima kasih atas doa, kasih sayang, canda tawa dan semangat yang kalian berikan..

Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga Allah Subhaanahuwata'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kalian semua.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah Subhaanahuwata'ala atas nikmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sebagai keterbatasan yang ada pada diri Penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini serta kebaikan dan kemudahan yang pernah diberikan kepada penulis, antara lain yaitu:

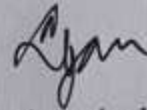
1. Allah ‘AzzaWajallaRabb semesta alam yang telah memberikan nikmat iman yang luar biasa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga penulis di beri kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan karya ini.
2. Kedua orang tua, Lasmin Lubi dan Ibunda tercinta Siti Aisah, atas segala doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir dan tidak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya, Semoga Allah Subhaanahuwata'ala selalu memberikan perlindungan, kesehatan, kasih sayang, dan surga-Mu serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Ayahanda dan Ibunda tercinta.
3. Kepada Kakak dan adikku Suko Setiawan dan Riyan Adi Saputra , yang selalu memberikan dukungan, saran dan kritik, serta semangat sampai saat ini sehingga Atika bisa menyelesaikan salah satu tugas yaitu menyelesaikan studi.
4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik..
6. Bapak Drs. Hertanto M.Si .Ph .D selaku Pembimbing Akademik penulis ucapkan terimakasih atas bimbingannya selama ini.
7. Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.
8. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP selaku pembahas dan penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran, serta memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sangat baik.
9. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
10. Staff Akademik dan Staff Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
11. Kepada Abang dan Mba Pemerintahan 2010, 2011, 2012, 2013. Terimakasih atas kritik dan saran selama ini. Sukses selalu untuk kita semua. Aamiin.
12. Sahabat-sahabat Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama ini, semoga kita semua kedepannya sukses dan dalam lindungan Allah SWT.
13. Kepada Ade Ria dan Retno Putri yang selalu support untuk segera menyelesaikan skripsi dengan cepat dan selalu support apapun.
14. Para narasumber telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritikan dan saran selaa proses penyelesaian skripsi ini dan pemberian informasi, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.

15. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang berharga.

Bandar Lampung, Juli 2021

Penulis



Ani Aminah Yan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	11
2.2 Administrasi Publik .....	11
2.3 Teori Pelaksanaan Program.....	12
2.3.1 Pengertian Program Pembinaan.....	12
2.3.2 Sasaran Program Pembinaan .....	14
2.4 Pembinaan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial .....	15
2.4.1 Pendampingan .....	15
2.5 Anak Jalanan.....	20
2.5.1 Pengertian Anak Jalanan .....	20
2.6 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Anak Jalanan .....	22
2.7 Kerangka Pikir .....	24
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	26
3.2 Fokus Penelitian .....	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	28

3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.5 Dokumentasi .....	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	30
<b>IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>	
4.1 Profil Kota Bandar Lampung .....	32
4.2 Sejarah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung .....	33
4.3 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	34
4.4 Tujuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung .....	34
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Hasil Penelitian.....	40
5.1.1 Penyebab Maraknya Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung ....	40
5.1.2 Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung	45
5.2 Pembahasan .....	47
<b>VI. KESIMPULAN</b>	
6.1 Simpulan .....	54
6.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Anak Jalanan Tahun 2010-2019 .....	6
Tabel 2. Jumlah Anak Jalanan Tahun 2010-2019 .....	43
Tabel 3. Percakapan dengan Narasumber Anak Jalanan 1.....	13
Tabel 4. Percakapan dengan Narasumber Anak Jalanan 2.....	16
Tabel 5. Percakapan dengan Narasumber Anak Jalanan 3.....	17
Tabel 6. Percakapan dengan Narasumber Anak Jalanan 4.....	18
Tabel 7. Percakapan dengan Narasumber Anak Jalanan 5.....	19
Tabel 8. Percakapan dengan Narasumber Anak Jalanan 6.....	20
Tabel 9. Percakapan dengan Narasumber Anak Jalanan 7.....	21
Tabel 10. Percakapan dengan Narasumber Anak Jalanan 8.....	22
Tabel 11. Percakapan dengan Narasumber Anak Jalanan 9.....	23
Tabel 12. Percakapan dengan Narasumber Anak Jalanan 10.....	24



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung .....13
- Gambar 2. Dokumentasi Bersama Ibu Evazati, S.Sos (Seksi Pelayanan Sosia; anak dan rehabilitasi penyandang cacat. ....14

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah setempat dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pada saat itu pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (6) , daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pemberian otonomi, banyak daerah-daerah yang berkembang sangat pesat terutama pada daerah perkotaan, tetapi juga tidak sedikit daerah yang mengalami banyak kesulitan dan tantangan pembangunan. Bagi daerah-daerah yang mengalami perkembangan pesat, ternyata juga menghadapi masalah dan tantangan, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, sementara ketersediaan lahan pemukiman terbatas. Begitu juga pada daerah yang maju pesat, menjadi daya tarik bagi warga di daerah-daerah sekitarnya, sementara keterampilan mereka untuk mencari penghidupan di kota sangat terbatas. Kondisi

inilah yang pada akhirnya menyebabkan lahirnya masalah-masalah perkotaan, antara lain kriminalitas, pengangguran, dan tumbuhnya anak jalanan.

Permasalahan sosial memang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan yakni masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Permasalahan ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya.

Kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak, serta menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Selain itu anak dari keluarga miskin menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan karena kondisi kemiskinan yang menyebabkan mereka kerap kali kurang terlindungi.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik fisik maupun mental untuk mencapai tujuan negara. Perkembangan kota melahirkan persaingan hidup sehingga muncul fenomena kehidupan yang berujung pada kemiskinan. Kota yang padat penduduk dan banyaknya keluarga yang bermasalah telah membuat semakin banyaknya anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kehilangan hak untuk bermain dan hidup merdeka sehingga munculnya kehidupan anak jalanan. Beberapa anak jalanan, khususnya di negara berkembang, merupakan anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Selain itu, beberapa anak jalanan juga berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal.

Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Sedangkan seniman jalanan adalah seseorang atau kelompok seniman menampilkan seni rupa yang

dibuat di tempat-tempat publik, biasanya karya seni yang dibuat di luar konteks tempat-tempat seni tradisional.

Fenomena anak jalanan di Indonesia menjadi persoalan sosial yang kompleks. Hidup yang dijalani anak jalanan bukan pilihan yang menyenangkan, hal ini karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya masih belum begitu besar dan solutif. UUD 1945, “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”, yang berarti pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak asasi anak terlantar dan anak jalanan pada hakekatnya sama dengan hak asasi manusia lainnya. Mereka harus mendapatkan hak secara normal sebagaimana layaknya anak lainnya.

Anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa anak jalanan di Indonesia berjumlah 33.400 jiwa dimana hampir separuhnya berada di Jakarta dan sisanya menyebar di kota besar lainnya. Sedangkan data yang diperoleh dari Kementerian Sosial RI, jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia pada tahun 2006 sebanyak 232.894 anak, tahun 2010 sebanyak 159.230 anak, tahun 2011 menurun menjadi 67.607 anak, dan pada tahun 2015 menjadi 33.400 anak.

Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2013 tentang Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah dalam telah banyak mengeluarkan kebijakan tentang anak jalanan. Koordinasi penanggulangan anak jalanan dalam Undang-Undang ini dilaksanakan melalui satu tim yang bersifat konsultatif dan koordinatif. Tim yang dimaksud dalam keputusan Presiden ini ialah mempunyai tugas dalam membantu Menteri Sosial dalam menetapkan kebijakan pemerintah di bidang penanggulangan anak jalanan,

gelandangan dan pengemis (gepeng). Tim tersebut bekerja dalam perumusan dan perincian kebijaksanaan pelaksanaan penganggulangan anak jalanan.

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bahwa tujuan negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang kemudian di turunkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua rangmiskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, namun pada kenyataannya tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk anak jalanan, seperti yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keputusan Presiden RI No. 36 yang ditetapkan pada Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convension on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Anak harus mendapatkan hak secara normal dan sebagaimana layaknya anak, seperti hak sipil dan kemerdekaan (*civil righ and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family envionment and altenative care*), kesehatan dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, reaksi dan budaya (*education, laisure and culture activies*), dan perlindungan khusus (*special protection*). Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 yang ditetapkan pada Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Tetapi, tidak semua anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan penghidupan yang layak seperti anak jalanan.

Masalah anak jalanan selalu dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia. Kota Bandar Lampung merupakan kota terbesar ketiga di Sumatera setelah Medan dan Palembang, dimana Bandar lampung adalah salah satu kota yang menghadapi permasalahan anak jalanan yang cukup kompleks. Tidak ada angka yang pasti

jumlah anak jalanan. Lemahnya ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong untuk anak-anak berkeliaran dijalanan dan rata-rata diantara mereka masih duduk di bangku sekolah namun memilih untuk bekerja agar mendapatkan uang yakni dengan menjadi pengamen, penjual koran, pemulung dan penyemir sepatu.

Dalam Pasal 34 UUD Tahun 1945 (setelah amandemen keempat), ayat 2: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Ayat ini mengamanahkan kepada para pengambil kebijakan terkait dalam hal ini Dinas Sosial Bandar Lampung untuk merumuskan kebijakan yang dapat memberdayakan kaum lemah dan terpinggirkan ini, bukan justru sebaliknya mematikan perekonomian mereka. Selama ini kebijakan yang diambil masih bersifat insidental, ketika ada kejadian baru diperhatikan.

Untuk menangani persoalan-persoalan kota yang tergambar di atas, pemerintah kota Bandar Lampung mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Pada pasal 1 disebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia 0 s/d 18 tahun yang beraktivitas di jalanan antara 4-8 jam perhari. Kemudian anak yang mempunyai masalah di jalanan adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran di tempat umum. Sejumlah warga Kota Bandar Lampung menyayangkan pemerintah setempat belum efektif dalam melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, buktinya masih banyak anak-anak yang mencari rejeki di jalanan.

Berikut ini adalah data anak jalanan di kota Bandar Lampung:

**Tabel 1.** Jumlah Anak Jalanan Tahun 2010-2019

No	Tahun	Jumlah (Jiwa)
1.	2010	55
2.	2011	65
3.	2012	73
4.	2013	99
5.	2014	72
6.	2015	105
7.	2016	127
8.	2017	189
9.	2018	197
10.	2019	184

Sumber: Dinas Sosial, 2020

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari awal berjalannya kebijakan ini sampai tahun 2013, namun kemudian berhasil turun pada tahun 2014, selanjutnya kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 197 jiwa dan kembali turun pada tahun 2019 menjadi 184 jiwa, meskipun angka tersebut terbilang masih tinggi dan menunjukkan kurang efektifnya pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah beberapa kali melakukan penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis, akan tetapi setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, ternyata langkah penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang sebelumnya pernah dijalankan hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu terdapat permasalahan-permasalahan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut yang dinilai kurang efektif, sementara sudah sepuluh tahun peraturan daerah tersebut sudah diberlakukan.

Aktivitas anak-anak jalanan di Kota Bandar Lampung beranekaragam, diantaranya sebagai pengamen, pedagang rokok, pedagang koran, penjual

kerupuk, pembersih mobil/angkot dan lain sebagainya. Mereka terutama beroperasi di tempat-tempat keramaian atau umumnya berada di perempatan jalan, pasar, terminal dan pusat perbelanjaan. Resiko-resiko yang dapat diidentifikasi antara lain menjadi korban kekerasan (penganiayaan, pemerasan, penangkapan dan perampasan modal kerja, serta eksploitasi seksual), kurang gizi (meminum mengkonsumsi minuman keras, tindakan kriminal, penyalahgunaan obat, seks bebas, serta kelangsungan hidup terancam (Huraerah, 2006:79).

Adanya anak jalanan yang semakin bertambah jumlahnya hal yang dirasakan semakin mencemaskan, hal ini karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi penertiban, kebersihan dan keamanan, serta keindahan kota. Mereka juga sering kali melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti sering berkata kotor, mengganggu ketertiban dijalanan misalnya, memaksa pengemudi kendaraan bermotor untuk memberi sejumlah uang (walaupun tidak seberapa jumlahnya). Anak-anak yang hidup dijalan sangat berbeda dengan anak-anak yang hidup dalam asuhan orang tuanya. Anak-anak dijalan hidup secara bebas. Mereka bebas melakukan apa saja yang mungkin belum patut dilakukan anak-anak seumuran mereka. Umumnya mereka terlihat berpakaian kumal, terkesan tidak rapi, merokok, mengonsumsi minuman keras, dan sebagainya.

Melihat berbagai kondisi yang dialami anak jalanan, maka Pemerintah Kota Medan khususnya melalui Dinas Sosial Kota Bandar Lampung perlu mengadakan program pembinaan anak jalanan, dimana dengan program yang nyata akan tercipta kebijakan utama untuk mengentaskan masalah anak jalanan. Disamping itu, kelanjutan dari program pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah implementasi yang nyata dengan diharapkan terciptanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan usia anak dan tidak terlalu membahayakan keselamatan jiwanya sehingga mereka tidak turun ke jalanan untuk bekerja, serta mendapat kesempatan untuk sekolah dan bermain sehingga tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Anak pun akan terdidik melalui pekerjaan itu untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Anak jalanan juga merupakan generasi muda yang seharusnya dipersiapkan untuk mengisi pembangunan dan berperan sebagai tulang punggung keberlangsungan bangsa.



Bila generasi muda tidak bisa diandalkan dikarenakan mereka hidup sebagai anak jalanan, maka keberlangsungan kehidupan bangsa juga akan terganggu.

Fredy tahun 2015 meneliti tentang Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yaitu; masih kurangnya sosialisasi oleh pelaksana perda kepada masyarakat sehingga masih sedikit masyarakat yang mengerti tentang peraturan tersebut. Selain itu, masih kurangnya kerjasama antara dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ada di kota Bandar Lampung sehingga masih kurang tempat untuk pembinaan.

Anasiru (2011) meneliti tentang implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar menggunakan beberapa tahapan pelaksanaan. Penerapan dilakukan dengan menggunakan empat model pendekatan yakni: (1) model pendekatan berbasis panti sosial atau *institutional based services*, (2) model pendekatan berbasis keluarga atau *family based services*, (3) model pendekatan basis masyarakat atau *community based services* dan (4) model pendekatan berbasis semi panti sosial atau *half-way house services*. Adanya *political will* dan kemauan keras serta keseriusan PEMDA Kota Makassar dalam hal ini wali Kota Makassar untuk menjadikan Makassar menjadi kota yang aman, tertib dan bebas dari anak jalanan, proses penanggulangan yang dilakukan oleh para pelaksana program melalui model-model pendekatan di atas, sangat mendukung program penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar. Minimnya koordinasi antar instansi terkait pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam menanggulangi anak jalanan merupakan suatu hambatan dalam implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar.

Penelitian juga dilakukan oleh Engkus (2019) tentang implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Bandung. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai pembinaan anak jalanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, belum mampu diterapkan secara efektif karena dari

tujuan dan sasaran dari peraturan Undang-undang Nomo 23 Tahun 2002 belum ada yang dapat tercapai secara maksimal. Kemudian, sumber daya dari Dinsosnangkis sendiri masih terbilang kurang. Dan masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini, terbukti masih banyak orang yang justru memberikan uang kepada anak jalanan dengan alasan kasihan maupun agar mereka cepat pergi dan tidak mengganggu. Padahal sudah jelas ada larangan dan himbauan dari pemerintah kepada masyarakat agar tidak memberikan uang terhadap anak jalanan atau gelandangan di jalanan.

Rizzana, *et al* (2013) meneliti tentang Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang Dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang dinilai belum cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari peran para aktor pelaksana yang belum maksimal. Beberapa aktor pelaksana tersebut adalah Dinas Sosial Kota Malang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dalam penelitian ini diwakili oleh Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan (LPAJ) Griya Baca. Dinas Sosial yang merupakan dinas yang baru terbentuk pada Januari 2013 lalu belum mempunyai kesiapan yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan maksimal. Sebelumnya, penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial cenderung pada upaya pemberdayaan, padahal pada kenyataannya anak jalanan memerlukan upaya perlindungan yang lebih dari itu. Selain itu, kerjasama antar aktor dalam implementasi kebijakan ini juga belum berjalan dengan maksimal, seperti halnya antara Dinas Sosial Kota Malang dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan (Griya Baca)

Masalah yang ditimbulkan oleh anak jalanan di kota Bandar Lampung merupakan masalah yang sering ditemukan di sebuah perkotaan. Anak jalanan lebih banyak tumbuh apalagi bila kota itu tumbuh dengan tingkat pemerataan kesejahteraan sosialnya sangat buruk. Adanya perbedaan pada tingkat kesejahteraan yang akan menjadi pendorong utama bertambahnya anak jalanan. Hal-hal tersebut di atas

adalah pendorong semangat peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Strategi Kebijakan Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan Kota Bandar Lampung”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah jelaskan, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mendorong dan menghambat strategi penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung?
2. Apakah strategi kebijakan penanggulangan anak jalanan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dibentuk adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat strategi penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui strategi kebijakan penanggulangan anak jalanan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkerja sama dalam membuat dan menyempurnakan kebijakan terkait penanganan anak jalanan di kota Bandar Lampung.
2. Menambah wawasan di bidang sosial serta menambah pengetahuan tentang bagaimana menganalisis suatu kebijakan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu administrasi Negara terkait dengan analisis kebijakan publik.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

### 2.2 Administrasi Publik

Istilah Administrasi Publik (*administration of public*) memperlihatkan bagaimana peran pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil keputusan dan prakarsa, penting atau baik menurut mereka untuk masyarakat karena masyarakat diasumsikan sebagai pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah. (Keban, 2014: 4) Selanjutnya, istilah administrasi publik merupakan konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah lebih mengarah kepada “*empowerment*” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi agar masyarakat mampu mengatur hidupnya tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah.

Dengan dilakukannya hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, mulai dari penentuan kebutuhan sampai pelaksanaan dan penilaian hasil, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator, dan dapat memfokuskan diri pada urusanurusan negara yang bersifat strategis. (Keban, 2014: 4-5) Sedangkan Henry, dalam Keban (2014: 6) administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha

melembagakan praktekpraktek manajemen agar sesuai dengan efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat.

Definisi ini melihat administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi administrasi publik diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan publik berdasarkan pertimbangan saran dari masyarakat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen agar kebijakan yang dihasilkan efektif, efisien bagi masyarakat.

## **2.3 Teori Pelaksanaan Program**

### **2.3.1 Pengertian Program Pembinaan**

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisikan langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Jika ditinjau dari aspek tingkat pelaksanaannya, secara umum pelaksanaan terhadap program dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu:

- a. Penilaian atas perencanaan, yaitu mencoba memilih dan menetapkan prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan atas cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Penilaian atas pelaksanaan, yaitu melakukan analisis tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan, didalamnya meliputi apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan, apakah ada perubahan-perubahan sasaran maupun tujuan dari program yang sebelumnya direncanakan (Siagian dan Suriadi, 2012 : 117 – 118).

Menurut Stoner dalam (Ketaren, 2009:14) program secara harfiah diartikan sebagai rencana aktivitas atau rencana kegiatan dalam suatu wadah tertentu. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Stoner tersebut maka program meliputi seperangkat kegiatan yang relatif luas dimana program ini memperlihatkan:

1. Langkah utama diperlukan untuk mencapai tujuan.
2. Unit atau anggota yang bertanggungjawab untuk setiap langkah.
3. Ukuran atau pengaturan dari setiap langkah.

Penyusunan program tidak semudah yang diperkirakan banyak orang, karena memerlukan waktu, uang dan pikiran. Tidak saja dari orang-orang yang membuatnya tetapi juga dari pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaannya dikemudian hari. Suatu program tidak hanya diuraikan tentang kegiatan apa, tetapi juga mengenai mengapa dilakukan kegiatan tersebut. Pembuatan penyusunan program perlu diperhatikan azas-azas di bawah ini (Wiriaatmadja, 1998:69):

1. Disusun berdasarkan analisa dan waktu.
2. Dipilih masalah-masalah berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan.
3. Ditentukan tujuan-tujuan dan cara-cara pemecahannya yang akan memberikan kepuasan kepada semua pihak.
4. Mempunyai kekekalan tetapi luwes (fleksibel).
5. Mempunyai keseimbangan-keseimbangan untuk keseluruhan masyarakat tetapi dengan mengutamakan yang terpenting.
6. Ada rencana kerja yang jelas dan tetap.
7. Merupakan suatu proses yang terus-menerus.
8. Merupakan suatu proses pengajaran dan pembimbingan.
9. Merupakan suatu proses koordinasi.
10. Memberikan kesempatan untuk penilaian (evaluasi) hasil-hasil pekerjaan.

Menurut (Mangunhardjana, 1999 : 37) pembinaan adalah menekankan pada pengembangan manusia dari segi praktis, yaitu pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Mangunhardjana mengatakan bahwa dalam pembinaan, orang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni, tetapi ilmu yang dipraktekkan tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Unsur pokok dalam pembinan adalah mendapatkan sikap dan kecakapan. Pembinaan dapat diartikan proses belajar

untuk melepaskan hal-hal yang dianggap sudah tidak berguna dan menggantinya dengan mempelajari pengetahuan dan praktek baru.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan berfungsi untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan, merubah dan mengembangkan sikap, memberikan latihan, mengembangkan kecakapan dan keterampilan. Pembinaan akan berjalan dengan baik apabila seseorang telah mengikuti pembinaan yang memiliki kemampuan untuk:

1. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya.
2. Menganalisa situasi kehidupan dan kerjanya dari segi positif dan negatif.
3. Menemukan masalah-masalah dalam kehidupan serta berusaha mengatasinya.
4. Menemukan hal-hal yang sebaiknya diubah atau diperbaiki.
5. Merenungkan sasaran yang ingin dicapai dalam hidup setelah mengikuti pembinaan (Mangunhardjan, 1999 : 16).

### **2.3.2 Sasaran Program Pembinaan**

Seminar advokasi anak jalanan yang dikutip oleh (Soedijar, 2004 : 29) mengatakan bahwa sasaran pembinaan anak jalanan:

- a. Melindungi dan berusaha mengangkat derajat anak jalanan.
- b. Memberikan pelayanan secara teliti sehingga kesehatan dan gizi mereka tetap terjamin.
- c. Menumbuhkan rasa sadar diri, semangat kerja dan mengangkat derajat hidup mereka sendiri bahkan keluarga dan masyarakat sekitarnya.
- d. Memberikan pengarahan pada waktu bermain, rekreasi dan pada saat waktu luangnya.

Isi dari program pembinaan harus sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian sasaran tersebut akan menjadi jawaban dari permasalahan yang dihadapi para anak jalanan. Suatu pembinaan yang tidak mempunyai sasaran yang jelas dapat mengandung bahaya yang besar karena kegiatan itu tidak akan memiliki arah dan tujuan. Sasaran perlu dirumuskan dengan jelas dan tegas dan sasaran harus ada hubungannya dengan minat dan kebutuhan yang dibina.

Program pembinaan memerlukan integritas dari seluruh program pembinaan, maka (Soedijar, 2004 : 29):

- a. Perlu dijaga agar dalam seluruh program diciptakan variasi, metode dalam mengolah kegiatan agar program berjalan lancer, memikat dan tidak monoton serta tidak membosankan.
- b. Perlu diketahui sikap, pengalaman dan keahlian Pembina dalam bidang pembinaan. Sikap Pembina sangat menentukan cara pelaksanaan program.

## **2.4 Pembinaan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial**

### **2.4.1 Pendampingan**

Proses pendampingan membutuhkan seseorang pendamping untuk melakukan kegiatan pendampingan. Departemen sosial mengemukakan bahwa pendampingan adalah “pekerja sosial yang dengan keahliannya atau pekerjaannya mendahulukan tugas-tugas pendampingan dimana yang bersangkutan bekerja sesuai dengan prinsip, metode dan pekerjaan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa “Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.”

Peran pekerja sosial sendiri tak kalah penting untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Peran pendamping yang dikemukakan departemen sosial sebagai berikut:

#### **1. Pembela (*advocator*)**

Pendamping melakukan pembelaan pada korban yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada korban, mendampingi korban dalam proses hukum, mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku.



## 2. Penghubung (*mediator*)

Pendamping berperan sebagai penghubung klien dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informal, dalam rangka merujuk dan sebagai tindak lanjut dari pelayanan yang di berikan RPTC.

## 3. Pemungkin (*enabler*)

Pendamping berperan dalam mengidentifikasi permasalahan korban kebutuhan dan menjaga langkah-langkah menghadapi permasalahannya.

## 4. Penjangkau (*outreacher*)

Pendamping berperan dalam melakukan penjangkauan kepada kelompok-kelompok yang rentan terhadap kekerasan dan korban tindak kekerasan yang membutuhkan layanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial.

## 5. Pemberi motivasi (*motivator*)

Pendamping berperan dalam memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada klien untuk dapat bersikap positif, pola pikir dan mengembangkan potensi sebagai upaya pemulihan korban.

Peranan pekerja sosial antara lain:

### 1. Peranan sebagai perantara

Yaitu menghubungkan sistem pelayanan dan memberikan informasi masalah penerima pelayanan kepada keluarga. Pekerja sosial memberikan bantuan baik secara materi maupun non materi yang berhubungan dengan kegiatan yang ada dibadan panti sosial. Selain itu pekerja sosial berupaya membentuk jaringan kerja dengan organisasi pelayanan sosial untuk mengontrol kualitas pelayanan sosial tersebut. dalam melaksanakan peranannya pekerja sosial perlu melakukan assessment kebutuhan klien atau penerima pelayanan. Adanya assessment kebutuhan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang bagi penerima pelayanan.

### 2. Peranan sebagai pemungkin

Yaitu peranan pekerja sosial dalam memfasilitasi dan memberikan peluang untuk pemecahan masalah atau menyelesaikan konflik. Peranan ini berhubungan dengan konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, penerima pelayanan untuk menolong dirinya sendiri. Konsep pemberdayaan

memberikan peluang pada kemampuan penerima pelayanan dan pekerja sosial dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi.

### 3. Peranan sebagai penghubung

Yaitu peranan pekerja sosial dalam membantu mengklarifikasikan posisi kedua belah pihak yang bertentangan dan mencariakan solusi penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Peranan yang dilakukan adalah membantu menyelesaikan konflik diantara dua sistem atau lebih serta menyelesaikan pertikaian antara keluarga dan klien atau penerima pelayanan dan memperoleh hak-hak korban.

### 4. Peranan sebagai advokasi

Peranan sebagai advokasi yaitu membela kepentingan korban untuk menjamin sistem sumber dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Peranan ini terlihat ketika pekerja sosial memberikan argumentasi tentang masalah penerima pelayanan, membela kepentingan dan memberikan pelayanan yang di butuhkan sehingga kebutuhan penerima pelayanan dapat terjamin.

### 5. Peranan sebagai perunding

Yaitu peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan klien atau penerima pelayanan mulai bekerja sama. Kerja sama antara penerima pelayanan dan pekerja sosial yang dimaksud melalui kegiatan bercerita, bertukar informasi maupun pengalaman.

### 6. Peranan sebagai pelindung

Yaitu melindungi klien atau penerima pelayanan sehingga merasa nyaman untuk mengutarakan masalahnya dan merasa bahwa masalahnya dapat dirahasiakan pekerja sosial. Peranan ini memberikan sebuah ketenangan bagi penerima pelayanan terhadap kerahasiaan masalah yang dihadapinya. Selain itu dalam praktik pekerjaan sosial sendiri memiliki etika untuk mengharuskan pekerja sosial merahasiakan masalah dari penerima pelayanan.

### 7. Pelayanan sebagai fasilitasi

Pekerja sosial harus bervariasi dalam memberikan pelayanan tergantung pada kebutuhan korban dan masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, pekerja sosial harus pandai melihat masalah maupun kebutuhan yang dihadapi

penerima pelayanan sehingga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh penerima pelayanan.

#### 8. Peranan sebagai inisiator

Pekerja sosial berupaya memberikan perhatian pada isu-isu seperti masalah korban yang ada di badan atau lembaga atau panti sosial dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Disinilah peran pekerja sosial untuk menyadarkan badan, lembaga, atau panti sosial bahwa ada permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Peran pekerja sosial ini sangat penting agar memberikan sebuah keadaran pada pihak-pihak terkait pembinaan tentang masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar.

#### 9. Peranan sebagai negosiator

Ditunjukkan pada penerima pelayanan yang mengalami konflik dan mencari penyelesaiannya sehingga tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dengan kata lain, negosiator memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi dari permasalahan pihak yang sedang berkonflik.

Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

#### 3. Pelatihan

Pelatihan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan. Pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang paling umum dan para pimpinan mendukung adanya pelatihan karena

melalui pelatihan, para pekerja akan menjadi lebih trampil dan karenanya akan lebih produktif sekalipun manfaat-manfaat tersebut harus diperhitungkan denangan waktu yang tersita ketika pekerja sedang dilatih. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar, berguna untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu relatif singkat dan metodenya mengutamakan praktek dari pada teori.

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek dari pada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan pelatihan orang dewasa dan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta dengan lingkungan yang mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan dan pelatihan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Peserta program pemberdayaan perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntunan peningkatan keterampilan yang dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya.

Pelatihan memberikan seseorang keterampilan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya pendidikan dan latihan yaitu:

1. Membantu individu untuk dapat membuat keputasa dan pemecahan masalah secara lebih baik.
2. Internalisasi dan operasionalisasi motivasi kerja, prestasi, tanggung jawab, dan kemajuan.
3. Mempertinggi rasa percaya diri dan pengembangan diri.
4. Membantu untuk mengurangi rasa takut dan menanggapi tugas-tugas baru.

#### 4. Penyuluhan

Penyuluhan bukanlah sekedar penerapan tentang kebijakan penguasa, bukan hanya dimensi teknologi, bukan program *charity* yang bersifat darurat, dan bukan program untuk mencapai tujuan yang tak merupakan kepentingan pokok

kelompok sasaran. Tetapi adalah program pendidikan luar sekolah yang bertujuan memberdayakan sasaran meningkatkan kesejahteraan sasaran secara mandiri dan membangun masyarakat madani. Pembelajaran yang berfungsi secara berkelanjutan dan tidak bersifat adhoc, serta program yang menghasilkan perubahan perilaku dan tindakan sasaran yang menguntungkan sasaran dan masyarakatnya.

Penyuluhan juga merupakan pendidikan bagi pihak yang disuluh agar berubah perilakunya berusaha lebih menguntungkan., hidup lebih sejahtera, dan bermasyarakat lebih baik serta menjaga kelestarian lingkungannya. Penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan “perilaku” (*behavior*) yang merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang atau pihak lain, baik secara langsung (berupa ucapan, tindakan, bahasa tubuh, dan lain-lain) maupun tidak langsung.

## **2.5 Anak Jalanan**

### **2.5.1 Pengertian Anak Jalanan**

Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan, tepatnya di Brazilia, dengan nama *Meninos de Ruas* untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki ikatan dengan keluarga. Istilah anak jalanan berbeda-beda untuk setiap tempat, misalnya di Columbia mereka disebut “*gamin*” (*urchin* atau melarat) dan “*chinces*” (kutu kasur), “*marginais*” (criminal atau marjinal) di Rio, “*pa’jaros frutero*” (perampok kecil) di Peru, “*pollilas*” (ngrengat) di Bolivia, “*resistoleros*” (perampok kecil) di Honduras, “*Bui Doi*” (anak dekil) di Vietnam, “*saligoman*” (anak menjijikkan) di Rwanda. Istilah-istilah itu sebenarnya menggambarkan bagaimana posisi anak-anak jalanan ini dalam masyarakat (Soedijar, 2004).

Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Secara khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak

jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat.

Anak jalanan adalah anak-anak yang mencari nafkah di jalanan. Mereka pada umumnya bekerja sebagai pengamen, pedagang asongan, gelandangan, pengemis, penjual koran, tukang semir sepatu, pemulung, tukang parker hingga pekerja seks anak. Anak jalanan sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya. Resistensinya terhadap permasalahan di jalanan cukup tinggi (Batubara, 2010:15).

Menurut Johanes dalam (Huraerah, 2006 : 80) pada seminar tentang pemberdayaan anak jalanan yang dilaksanakan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (STKS) menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan baik untuk bekerja maupun tidak yang terdiri dari anak-anak yang mempunyai hubungan dengan keluarga dan anak yang mandiri sejak kecil karena kehilangan orangtua dan keluarga. Dalam buku "Intervensi Psikososial" (Depsos, 2001 : 20), anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah seseorang yang masih belum dewasa (secara fisik dan psikis) yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya yang terkadang mendapat tekanan fisik atau mental dari lingkungannya.

Menurut Departemen Soisal (dalam Dwi Astutik, 2005 : 21-22), karakteristik anak jalanan terbagi dua meliputi ciri-ciri fisik dan psikis. Ciri-ciri fisik antara lain: warna kulit kusam, rambut kemerahan, kebanyakan berbadan kurus, dan pakaian tidak terurus. Sedangkan ciri-ciri psikis antara lain: mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, kreatif, semangat hidup tinggi, berani menanggung resiko, dan mandiri. Konsep anak jalanan dapat

diidentifikasi berdasarkan ciri dari anak jalanan tersebut. Menurut Mulandar, empat ciri yang melekat ketika seorang anak digolongkan sebagai anak jalanan, yaitu:

- a. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari.
- b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat SD).
- c. Berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya).
- d. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).

Selain ciri khas yang melekat akan keberadaannya, anak jalanan juga dapat dibedakan dalam tiga kelompok. Menurut Surbakti, pengelompokan anak jalanan tersebut sebagai berikut:

- a. *Children on the street*; yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan dalam kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuanya.
- b. *Children of the street*; yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan, lari, atau pergi dari rumah.
- c. *Children from families of the street*; yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya.

## 2.6 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Anak Jalanan

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan, seperti kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orangtua dan masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orangtua. Kombinasi dari factor-faktor ini seringkali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan. Pada batas-batas tertentu, memang tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup di jalanan. Bukan berarti kemiskinan merupakan satu-satunya factor determinan yang menyebabkan anak lari dari rumah dan terpaksa hidup di jalanan. Kebanyakan anak bekerja di jalanan bukanlah atas kemauan sendiri, melainkan sekitar 60% diantaranya karena dipaksa oleh orangtuanya (Bagong, 2005 : 48).

Surjana menyebutkan bahwa ada tiga tingkatan penyebab anak turun ke jalan, yakni sebagai berikut:

- a. Tingkat mikro (*immediate cause*), yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya.
- b. Tingkat meso (*underlying causes*), yaitu faktor yang ada di masyarakat.
- c. Tingkat makro (*basic cause*), yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro.

Pada tingkat mikro sebab yang bisa diidentifikasi dari anak dan keluarga yang berkaitan tetapi juga bisa berdiri sendiri, yakni:

- a. Lari dari keluarga, disuruh bekerja baik karena masih sekolah atau sudah putus, berpetualangan, bermain-main atau diajak teman.
- b. Sebab dari keluarga adalah terlantar. Ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga/tetangga, terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak menghadapi masalah fisik, psikologis dan sosial.



Pada tingkat meso (masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

- a. Pada masyarakat miskin, anak-anak adalah asset untuk membantu peningkatan keluarga, anak-anak diajarkan bekerja yang berakibat keluar dari sekolah.
- b. Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi kebiasaan dan anak-anak mengikuti kebiasaan itu.
- c. Penolakan masyarakat dan anggapan anak jalanan sebagai calon kriminal.

Pada tingkat makro (struktur masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi antar lain:

- a. Ekonomi adalah peluang pekerjaan sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan keahlian, mereka harus lama di jalanan dan meninggalkan bangku sekolah, ketimpang desa dan kota yang mendorong urbanisasi.
- b. Pendidikan adalah biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang diskriminatif, dan ketentuan-ketentuan teksis yang birokratis yang mengalahkan kesempatan belajar.

## **2.7 Kerangka Pikir**

Masalah mengenai anak jalanan di Indonesia adalah masalah sosial yang yang tidak ada habisnya, menjadi anak jalanan bukan pilihan yang menyenangkan karena mereka berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan jelas, dan adanya anak jalanan tidak jarang menjadi masalah bagi berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat dan negara. Akan tetapi, perhatian terhadap anak jalanan belum begitu besar dan solutif. Dalam UUD Tahun 1945, “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”, hal ini berarti pemerintah memiliki tanggung jawab pada pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak asasi anak terlantar dan anak jalanan pada hakekatnya sama dengan hak asasi manusia pada umumnya.

Masalah anak jalanan selalu ada di kota-kota besar di Indonesia. Kota Bandar Lampung adalah kota terbesar ketiga di Sumatera setelah Medan dan Palembang, dimana Bandar Lampung adalah salah satu kota yang menghadapi permasalahan

anak jalanan yang cukup kompleks. Tidak ada angka yang pasti jumlah anak jalanan. Lemahnya ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong untuk anak-anak berkeliaran di jalanan dan rata-rata diantara mereka masih duduk di bangku sekolah namun memilih untuk bekerja agar mendapatkan uang yakni dengan cara mengamen, berjualan koran, memulung dan menyemir sepatu.

Dalam Pasal 34 UUD yang ditetapkan pada Tahun 1945 (setelah amandemen keempat), ayat 2: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Ayat ini mengamanahkan kepada para pengambil kebijakan terkait dalam hal ini Dinas Sosial Bandar Lampung untuk merumuskan kebijakan yang dapat memberdayakan kaum lemah dan terpinggirkan ini, bukan justru sebaliknya mematikan perekonomian mereka. Selama ini kebijakan yang diambil masih bersifat insidental, ketika ada kejadian baru diperhatikan.

Untuk menangani persoalan-persoalan kota yang tergambar di atas, pemerintah kota Bandar Lampung mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Pasal 1 menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia 0 s/d 18 tahun yang beraktivitas di jalanan antara 4-8 jam perhari. Sejumlah warga Kota Bandar Lampung menyayangkan pemerintah setempat belum efektif dalam melaksanakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, buktinya masih banyak anak-anak yang mencari rejeki di jalanan.



Gambar 1. Kerangka Pikir

## **III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan Taylor dalam Moleong (2007: 4) berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi. Dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata, dan gambar. Maksud penulis menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang kebijakan penanganan anak jalanan di kota Bandar Lampung.

Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Sedangkan yang dimaksud penelitian kualitatif menurut Sugiono dalam Pasolong (2013: 161) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Untuk mempertajam penelitian maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan fokus. Spadley dalam Sugiyono (2010: 208) menyatakan bahwa *A focused refer to a single cultural domain or a few related domains* maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh akan lebih spesifik. Berdasarkan teori diatas, maka yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah menganalisis kebijakan Penanganan anak jalanan kota Bandar Lampung, yakni:

- a. Masalah-masalah yang berkaitan dengan maraknya Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung.
- b. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang Anak Jalanan.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan penelitian, dalam penelitian ini lokasi menjadi sumber informasi yang dapat mengungkap dan menggambarkan fenomena yang terjadi serta informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai analisis kebijakan penanganan anak jalanan Kota bandar lampung dengan studi kasus Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota Bandar Lampung. Lokasi dalam penelitian ini adalah tempat tempat keramaian seperti lampu merah, pasar tradisional, terminal dan tempat umum lainnya. Gambaran kejadian tersebut sering peneliti perhatikan sehari-hari banyak di Pasar Way Halim, Pasar Tengah dan Lampu Merah Bypass (Sukarame Penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*), alasan peneliti mengambil sampel lokasi tersebut karena wilayah tersebut sangat strategis bagi anak jalanan yang berprofesi sebagai pengamen, penjual koran, asongan dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Peneliti juga melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2009: 224) mengatakan pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural alamiah), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai informan, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang telah diaplikasikan meliputi

#### 1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun observasi yang peneliti lakukan yaitu mengamati secara langsung kegiatan anak jalanan, jam aktivitas anak jalanan dan penanganan serta pembinaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

#### 2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menjangkau data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan baik secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*), maupun wawancara bebas (tidak terstruktur) bersamaan dengan observasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah *tape recorder*, dimana dilengkapi juga dengan catatan-catatan kecil peneliti. Pada proses ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan penanganan anak jalanan Kota Bandar Lampung. Pertanyaan yang diajukan tersebut diharapkan dapat membantu peneliti menemukan jawaban dari rumusan penelitian yang mengacu pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 3.5 Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah arsip- arsip yang dimiliki Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dari surat kabar, foto, maupun buku- buku atau literatur yang sesuai dengan bahasan penelitian.

Peneliti melakukan observasi di beberapa titik lalu menentukan titik mana yang paling ramai. Lalu ditentukanlah lampu merah wai halim dan lampu merah sukarama (bypass)

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan & Biklen dalam Moleong (2007: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data (*reduction data*).

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Pada penelitian ini data yang diperoleh dipilih dan di rangkum untuk disesuaikan kembali dengan fokus penelitian tentang analisis kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan juga dapat diartikan sebagai proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

### **3.7 Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2007: 324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

#### 1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data

Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan



derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataannya ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

a. Triangulasi

Menurut Moeleong (2007: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzin dalam Moleong (2007: 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu, triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain.

b. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian setelah dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.

3. Kepastian Data

Menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian. Dalam hal ini yang melakukan pengujian hasil penelitian adalah pembimbing skripsi.

## IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

### 4.1 Profil Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena menjadi pintu gerbang utama pulau sumatra, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari pulau jawa menuju sumatra maupun sebaliknya.

Penduduk Bandar Lampung dapat dibagi menjadi *jurai* asli yang merupakan penduduk asli yang bersuku Lampung dan jurai pendatang, yaitu penduduk dari provinsi lain yang tinggal dan menetap di Lampung. Provinsi Lampung juga merupakan daerah penerima migrasi penduduk indonesia, dari masa kolonisasi hingga transmigrasi, sehingga penduduk Lampung pun terdiri dari berbagai etnis. Tak hanya lewat program transmigrasi, banyak pula penduduk dari provinsi lain yang merantau ke Bandar Lampung untuk mengadu nasib. Sebagai ibukota provinsi, Bandar Lampung memiliki keuntungan karena setiap kegiatan baik dari pemerintahan, politik pendidikan, kebudayaan dan perekonomian lebih cepat bertumbuh dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain yang berada di Provinsi Lampung.

Kota Bandar Lampung memiliki prospek yang kuat untuk berkembang menjadi kota besar dalam skala regional, nasional, bahkan internasional, potensi Kota Bandar Lampung yang mendukung antara lain adalah lokasi geografis yang

sangat strategis, kedudukan yang dituju dalam kebijaksanaan tingkat nasional dan regional, pemandangan alam yang indah dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan, keanekaragaman suku bangsa (*multi ethnic*), dan dukungan wilayah sekitarnya (*hinterland*) yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandar Lampung.

Berbagai potensi yang dimiliki Bandar Lampung serta interland-nya, yang sebagaimana telah diakomodasikan dalam kebijaksanaan dan rencana baik lingkup nasional, regional maupun lokal, menggambarkan masa depan kota Bandar Lampung yang prospektif. Antisipasi yang bersifat proaktif menjadi kebutuhan utama dalam mendorong dan mengendalikan perkembangan kota Bandar Lampung. Posisi geografis mengantar Bandar Lampung untuk meraih peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang berperan dalam sistem ekonomi regional IMS-GT maupun menjadi bagian dari koridor kegiatan ekonomi Indonesia yang terbesar, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jaboditabek. Dalam konstelasi ruang perekonomian tersebut, Bandar Lampung berpeluang mengisi fungsi-fungsi ekonomi secara selektif dan kompetitif, terutama dalam sistem pusat-pusat pertumbuhan yang ada. Peningkatan akses yang strategis bagi aliran barang adalah melalui pengembangan pelabuhan panjang. Pelabuhan ini yang diharapkan menjadi pelabuhan ekspor dan impor terbesar di Sumatera bagian selatan harus memanfaatkan peluang dari limpahan daya tampung Tanjung Priok, bahkan menciptakan pelayanan yang bersaing dengan pelabuhan Bojonegara dan Palembang hingga menjadi alternatif pilihan bagi aliran barang ke dalam negeri dan negara lain.

#### **4.2 Sejarah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan peraturan daerah nomor 24 tahun 1996 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas sosial kota tingkat II Bandar Lampung, telah berubah bentuk dan fungsinya. Untuk operasional pelaksanaan perda tersebut, diatur rincian tugas masing-masing jabatan struktural di lingkungan dinas sosial kota kepala daerah tingkat II Bandar Lampung berdasarkan keputusan Walikota Kepala Daerah tingkat II Bandar Lampung nomor 19 tahun 1998 tentang

peraturan pelaksanaan peraturan daerah kota daerah tingkat II bandar lampung nomor 24 tahun 1996 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas sosial kota daerah tingkat II bandar lampung. Dengan adanya otonomi daerah sejak tahun 1999 berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dinas sosial kota daerah tingkat II bandar lampung kemudian mengalami perubahan, yaitu berdasarkan keputusan walikota bandar lampung nomor 30 tahun 2003 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas sosial kota bandar lampung.

#### **4.3 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**

a) Visi

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

b) Misi

Untuk mewujudkan misi tersebut, Dinas Sosial kota Bandar Lampung merumuskannya menjadi 6 misi, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial PMKS di Kota Bandar Lampung.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana penanganan PMKS dan PSKS maupun pendanaan pembangunan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan kualitas SDM Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
- 6) Peningkatan koordinasi partisipasi masyarakat dalam penanganan penyandang masalah maupun peningkatan kerukunan umat beragama.

#### **4.4 Tujuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, yang tercermin dalam wujud terpelihara dan berkembangnya sistem nilai sosial budaya yang menduduki terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

##### **1. Gambaran Pembinaan Anak Jalanan**

Pemerintah kota Bandar Lampung dalam mewujudkan tujuan pembinaan, maka dalam mewujudkan tujuan tersebut diselenggarakan program yang terencana yakni usaha pencegahan, usaha penanggulangan dan usaha rehabilitasi sosial.

- 1) Usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Usaha pencegahan dilakukan antara lain:
  - a. Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas sosial dan atau bekerja sama dengan instansi terkait serta LSM dengan cara menyiapkan instrumen pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi.
  - b. Pemantauan pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan dinas sosial dan atau bekerjasama dengan instansi terkait serta unsure masyarakat dengan cara:
    - Melakukan patroli ditempat umum yang dilakukan oleh dinas sosial kota Bandar Lampung.

- Memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitas ditempat umum secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.
- c. Sosialisai, yang dilakukan oleh instansi terkait ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan organisasi sosial, yang meliputi:
- Sosialisasi secara langsung, melalui kegiatan interaktif dan ceramah
  - Sosialisasi secara tidak langsung, melalui media cetak maupun media elektronik.
- 2) Usaha penanggulangan dalam bidang perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur satuan polisi pamong praja dan unsur polri dan atau unsure msyarakat terkait, unsur mahasiswa, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk tidak turun ke jalan dengan membuat posko yang berbasis di jalanan yang dilakukan dengan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi tanpa dilukukannya penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dibentuknya posko tersebut.

Pengendalian sewaktu-waktu yang dilakukan secara kordinatif oleh instansi terkait dan tim terpadu yang terdiri dari Dinas Sosial, unsur satpol pp dan dapat juga dengan unsur polri dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta kelompok atau perseorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

Penampungan sementara dilakukan dalam rangka pembinaan yang dilakukan dengan system panti sosial pemerintah yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (*outband*) dengan melindungi dan menjamin

hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya.

Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (*case conference*) untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi serta untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sehingga dapat dijadikan sebagai *file* permanen bagi setiap anak jalanan, pengemis, dan gelandangan agar dapat digunakan dalam pemantauan dan pembinaan selanjutnya. Pendampingan sosial dilakukan dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan. Kemudian dalam hal rujukan, berdasarkan seleksi meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengambilan bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta diproses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan melalui sistem panti maupun diluar panti. Sasaran rehabilitasi sosial adalah:

- a. Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia produktif dengan kegiatan yaitu:
- Seleksi, bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.
  - Bimbingan mental spiritual, dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan.
  - Bimbingan fisik, meliputi kegiatan olahraga dan pemeriksaan Kesehatan.
  - Bimbingan sosial, sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun berkelompok..
  - Bimbingan dan pelatihan keterampilan, disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu yang pelaksanaan dalam bentuk kerjasama dengan instansi terkait dan atau stakeholder.
  - Bantuan stimulan peralatan kerja sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh.
  - Penempatan atau penyaluran, untuk memfasilitasi penerima pelayanan yang memiliki keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan pada tempat yang layak terutama disektor produksi dan jasa serta wirausaha agar dapat hidup mandiri dan atau kembali ke keluarga dan masyarakat.
- 4) Usaha rehabilitasi sosial bagi anak jalanan usia balita, dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan



pemberian makanan tambahan, yang dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pendidikan pra sekolah, mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat yang pelaksanaannya dilakukan oleh pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, anggota lembaga sosial masyarakat dan anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendamping.

5) Usaha rehabilitasi sosial bagi nak jalan usia sekolah meliputi:

- Bimbingan mental spiritual, dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku anak, agar berkeinginan sekolah atau kembali ke bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti, yang dilakukan oleh pendamping.
- Bimbingan fisik, meliputi kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan.
- Bimbingan sosial, sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahan sendiri.
- Bimbingan pra sekolah, dilakukan dengan cara pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan penerima pelayanan memasuki dunia pendidikan formal yang lebih terarah, terbina dan pengenalan kondisi situasi sekolah serta memberikan pemahaman dan penertian pada mata pelajaran sekolah sesuai dengan strata sekolah yang dilakukan oleh instansi terkait, pendamping dan *stakeholder*.
- Bantuan stimulant beasiswa dan peralatan sekolah, sebagai motivasi belajar dan meringankan beban keluarga penerima pelayanan yang dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan dinas terkait dan atau *stakeholder*.
- Penempatan, meliputi kegiatan pengambilan ke keluarga dan atau difasilitasi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal (berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah) dan non formal (

dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan yang akan dirujuk untuk memasuki program paket A, B dan C).

## **VI. KESIMPULAN**

### **6.1 Simpulan**

1. Faktor penyebab maraknya anak jalanan adalah karena himpitan ekonomi. Beberapa anak mencari uang dijalanan Karen orangtuanya yang meminta mreka untuk mencari uang, selalin itu anak anak juga mencari uang jajannya dengan mandiri. Sebagian dari mereka yang telah terjun ke jalanan akan mengajak temannya untuk turun ke jalanan juga.
2. Strategi yang di lakukan dinas sosial Kota Bandar Lampung untuk penanganan anak jalanan belum dilaksanakan secara tegas. Dinas sosial mengerahkan Satpol PP untuk diturunkan secara berkala untuk mengurangi anak jalanan yang ditemukan dijalanan. Oleh satpol PP mereka akan dikembalikan ke dinas, lalu akan menghubungi orang tuanya untuk akhirnya dikembalikan atau dibina kembali di panti swasta.

### **6.2 Saran**

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan pola pembinaan dinas sosial dalam menanggulangi anak jalanan Kota Bandar Lampung adalah berikut :

1. Pemerintah kota bandar lampung seharusnya meningkatkan jumlah anggaran terhadap dinas sosial dalam program pembinaan anak jalanan seperti anggaran yang digunakan untuk sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik. Sehingga program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam penanggulan anak jalaan bisa berjalan secara optimal.
2. Pemerintah seharusnya memiliki panti rehabilitasi sendiri agar dinas sosial dapat turut serta dalam pelaksanaan pembinaan. Pemerintah juga hendaknya

membuat program pembinaan lanjutan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi dan mengembangkan rasa tanggung jawab serta kesadaran hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan lanjutan ini sangat penting, karena disamping anak jalanan termonitoring kegiatannya juga dapat diketahui keberhasilan dari program rehabilitasi yang diberikan.

3. Anak jalanan diberikan keahlian, diberikan pelajaran moral agar kedepannya dapat memanfaatkan keahlian yang didapat dan menghasilkan uang. Lalu pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan agar setelah penanaman softskill dapat langsung terjun ke lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anasiru, Ronawaty. 2011. Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar. *Sosiokonsepsia*, Vol. 16 No. 02
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Batubara, Hambali. 2010. *Penelitian Profil Anak Jalanan* di DKI Jakarta. Jakarta: PT. Grasindo
- Departemen Sosial. 2006. *Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- Dun, William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Engkus. 2019. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Bandung. *Open Journal Systems*. Vol.14 No.3
- Huraerah, Abu. 2006, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Bandung: Nuansa
- Kadir, Abdul. 2015. *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*, CV.Dharma Persada- Dharmasraya
- Ketaren, Nurlela. 2009. *Asas-asas Manajemen*. Medan: USU Press
- Mangunhardjana, A. 1986. *Pembinaan, Arti, dan Metodenya*, Jakarta: Kanisius
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Rizzana, *et al.* 2013. Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi (Studi Pada Dinas Sosial Kota

Malang Dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1 No.3, h 174-182

Siagian, Matias, dan Suriadi, Agus. 2012. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perspektif Pekerjaan Sosial*. Medan: Fisip USU Press

Soedijar, A. 2004. *Penelitian Profil Anak Jalanan DKI Jakarta*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Sosial, Jakarta: Departemen Sosial

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta Winarno, Budi. 2014, *Kebijakan Publik*. Yogyakarta

### **Sumber lain**

Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan Vol. 3 No. 1 Januari - April 2011

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2010

### **SumberBuku:**

Abdul Wahab, Solihin. 2010. *Analisis kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Bajari, Atwar. 2012. *Anak Jalanan, dinamika Komunikasi dan Perilaku Sosial Anak Jalanan Menyimpang*. Bandung: Humaniora.

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Islamy, Irfan.2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2010. *Terori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi.2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Buku Seru.

**Referensi Jurnal:**

Anggara, Fredi. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Perda No 03 Tahun 2010*. Bandar Lampung

Sulistiowati, Rahayu dkk. 2009. *Jurnal Administratio. Volume 3 nomor 7 periode juli-desember 2009*. Bandar Lampung: Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik Program Studi Administrasi Negara FISIP UNILA.

Sulistiowati, Rahayu dkk. 2014. *Jurnal Administratio. Volume 5 nomor 1 periode januari-juni 2014*. Bandar Lampung: Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik Program Studi Administrasi Negara FISIP UNILA.

**Referensi Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gembel dan Pengemis di Kota Bandar Lampung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU No. 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 31 Tahun 2013 tentang Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convension on the Right of the Chil (konvensi tentang hak-hak anak).

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

UU No. 31 Tahun 2013 tentang Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan A